



# LAPORAN INOVASI DAERAH

**Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang**

**Nomor Registrasi: 33.25-13951-53603-2021**

## 1. PROFIL INOVASI

### 1.1. Nama Inovasi

Klinik Hukum Online (Legal Care Online)

### 1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang ( setda.batang )

### 1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

### 1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

### 1.5. Jenis Inovasi

Digital

### 1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

### 1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### 1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Sebagai salah satu fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang adalah melakukan peningkatan pelayanan di bidang pelayanan publik dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan sosialisasi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sedangkan tugas pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM diantaranya adalah memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi Pemerintah Daerah. Dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Batang, perlu adanya pengambilan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku, yang dalam prosesnya memerlukan ketajaman analisa dan kajian hukum yang berkualitas disertai kecepatan dalam menyampaikan hasil kajian/rekomendasi kepada pihak terkait.

Dengan kompleksitasnya tugas pokok dan fungsi pada subbag bantuan hukum serta konsultasi dan advokasi hukum lebih cepat dan mudah, maka diperlukan inovasi dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi yaitu dengan sarana konsultasi hukum online secara gratis.

Sebagai salah satu fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang adalah melakukan peningkatan pelayanan di bidang pelayanan publik dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan dan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan sosialisasi hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Batang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sedangkan tugas pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM diantaranya adalah memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi Pemerintah Daerah. Dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Batang, perlu adanya pengambilan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku, yang dalam prosesnya memerlukan ketajaman analisa dan kajian hukum yang berkualitas disertai kecepatan dalam menyampaikan hasil kajian/rekomendasi kepada pihak terkait.

Dengan kompleksitasnya tugas pokok dan fungsi pada subbag bantuan hukum serta konsultasi dan advokasi hukum lebih cepat dan mudah, maka diperlukan inovasi dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi yaitu dengan sarana konsultasi hukum online secara gratis.

### **1.9. Tujuan Inovasi Daerah**

Melakukan pelayanan konsultasi/kajian hukum secara online dan Melakukan interaksi konsultasi hukum secara online

### **1.10. Manfaat Yang Diperoleh**

Masyarakat dapat melakukan konsultasi hukum dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa biaya

### **1.11. Hasil Inovasi**

<https://bagianhukum.batangkab.go.id/lco/>

### 1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

21-12-2020

### 1.13. Waktu Implementasi

21-12-2020

### 1.14. Anggaran

-

### 1.15. Profil Bisnis -

### 1.16. Kematangan

28.00

## 2. INDIKATOR INOVASI

| NoIndikator SPD   | Informasi  | Bukti Dukung   |
|---|--|--|
| 1. Regulasi Inovasi Daerah                                  | -  | Tidak Tersedia   |
| 2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah                 | -  | Tidak Tersedia   |
| 3. Dukungan Anggaran  | Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah         | DPA SKPD TA 2020<br>KEGIATAN PENYEDIAAN<br>PERLATAN DAN<br>PERLENGKAPAN KANTOR |
| 4. Penggunaan IT  | Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring | LINK WEBSITE LEGAL CARE<br>ONLINE (LCO)  |
| 5. Bimtek Inovasi   | -  | Tidak Tersedia   |
| 6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD | -  | Tidak Tersedia   |
| 7. Jejaring Inovasi   | -  | Tidak Tersedia   |
| 8. Replikasi  | -  | Tidak Tersedia   |
| 9. Pedoman Teknis   | Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual                 | PETUNJUK PENGGUNAAN<br>LEGAL CARE ONLINE (LCO)                                 |
| 10. Pelaksana Inovasi Daerah                                | -  | Tidak Tersedia   |

|     |  |                                   |                                   |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11. | Kemudahan Informasi Layanan              | Layanan Email/Media Sosial        | AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KAB BATANG |
| 12. | Penyelesaian Layanan Pengaduan           | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 13. | Keterlibatan aktor inovasi               | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 14. | Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 15. | Online Sistem                            | Ada dukungan melalui web aplikasi | SCREENSHOT WEB LCO                |
| 16. | Kecepatan Inovasi                        | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 17. | Kemanfaatan Inovasi                      | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 18. | Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah   | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 19. | Sosialisasi Inovasi Daerah               | -                                 | Tidak Tersedia                    |
| 20. | Kualitas Inovasi Daerah                  | -                                 | Tidak Tersedia                    |